

PENINGKATAN LITERASI DIGITAL MELALUI KOLABORASI PEMERINTAH, SEKTOR SWASTA, DAN MASYARAKAT: KONTRIBUSI TERHADAP PENCAPAIAN SDGS 2030 DALAM PENDIDIKAN

Astarina Nilam Kirana *¹

Eka Putri Lestari ²

Ichsan Fauzi Rachman ³

^{1,2,3} Universitas Siliwangi

*e-mail : astarinakirana@gmail.com¹, eka7878@gmail.com², ichsanfauzirachman@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implikasi peningkatan literasi digital terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) 2030, dengan fokus pada perspektif aksesibilitas dan inklusivitas. Literasi digital, yang meliputi kemampuan individu untuk mengakses, memahami, dan menggunakan teknologi digital secara efektif, memainkan peran penting dalam mendorong perkembangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan. Penelitian ini menemukan bahwa peningkatan literasi digital dapat mempercepat pencapaian berbagai tujuan SDGs, seperti pendidikan berkualitas (SDG 4), pengentasan kemiskinan (SDG 1), dan pengurangan kesenjangan (SDG 10). Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan signifikan terkait aksesibilitas dan inklusivitas, terutama di kalangan kelompok rentan seperti masyarakat pedesaan, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas. Kesimpulannya, untuk memaksimalkan manfaat literasi digital dalam pencapaian SDGs, diperlukan kebijakan yang komprehensif dan inklusif yang memastikan akses merata terhadap teknologi digital serta program pendidikan yang relevan. Studi ini memberikan rekomendasi strategis untuk pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dalam upaya mengintegrasikan literasi digital sebagai komponen kunci dalam strategi pembangunan berkelanjutan.

Kata Kunci : Literasi Digital, Sustainable Development Goals 2030, Teknologi Digital.

Abstract

This research examines the implications of increasing digital literacy for achieving the 2030 Sustainable Development Goals (SDGs), with a focus on the perspective of accessibility and inclusivity. Digital literacy, which includes an individual's ability to access, understand, and use digital technology effectively, plays an important role in driving sustainable social, economic, and environmental development. This research finds that increasing digital literacy can accelerate the achievement of various SDG goals, such as quality education (SDG 4), poverty alleviation (SDG 1), and reducing inequality (SDG 10). However, this research also identified significant challenges regarding accessibility and inclusivity, especially among vulnerable groups such as rural communities, people with disabilities, and minority groups. In conclusion, to maximize the benefits of digital literacy in achieving the SDGs, comprehensive and inclusive policies are needed that ensure equitable access to digital technology and relevant educational programs. This study provides strategic recommendations for policy makers and stakeholders in efforts to integrate digital literacy as a key component in sustainable development strategies.

Keywords : Digital Literacy, Sustainable Development Goals 2030, Digital Technology.

PENDAHULUAN

Peningkatan literasi digital merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh masyarakat modern di era digitalisasi saat ini. Literasi digital, yang mencakup kemampuan individu dalam menggunakan, memahami, dan mengevaluasi informasi yang diperoleh melalui media digital, menjadi semakin penting seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat. Ketika informasi menjadi semakin mudah diakses dan disebarkan melalui internet, keterampilan literasi digital yang memadai menjadi kunci untuk memastikan bahwa individu dapat memanfaatkan teknologi dengan efektif dan bijaksana. Oleh karena itu, upaya peningkatan

literasi digital menjadi sangat penting dalam konteks pendidikan dan pembangunan berkelanjutan.¹

Peningkatan literasi digital tidak dapat dilakukan secara parsial atau terbatas pada satu sektor saja. Diperlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mencapai hasil yang signifikan dan berkelanjutan. Pemerintah memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan dan menyediakan infrastruktur yang mendukung pengembangan literasi digital. Sektor swasta, dengan sumber daya dan inovasinya, dapat berkontribusi melalui penyediaan teknologi, pelatihan, dan program-program edukatif. Sementara itu, masyarakat, termasuk lembaga pendidikan dan organisasi non-pemerintah, dapat berperan dalam mengimplementasikan dan menyebarkan inisiatif literasi digital di tingkat akar rumput.

Kolaborasi ini sangat relevan dalam konteks pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, khususnya pada tujuan keempat, yaitu memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas serta mendorong kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua. Literasi digital merupakan komponen penting dari pendidikan abad ke-21, yang tidak hanya melibatkan keterampilan teknis tetapi juga kemampuan kritis dan analitis dalam menggunakan teknologi digital. Melalui peningkatan literasi digital, individu dapat lebih siap menghadapi tantangan global, berkontribusi pada ekonomi digital, dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat informasi.

Selain itu, literasi digital juga memiliki dampak langsung terhadap pemberdayaan masyarakat dan pengurangan kesenjangan digital. Di banyak negara berkembang, akses terhadap teknologi dan keterampilan digital masih sangat terbatas, yang menyebabkan ketimpangan dalam peluang pendidikan dan ekonomi. Dengan mengadopsi pendekatan kolaboratif, program-program literasi digital dapat menjangkau kelompok-kelompok yang terpinggirkan dan memastikan bahwa manfaat teknologi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip SDGs yang menekankan pentingnya inklusivitas dan kesetaraan.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, berbagai inisiatif telah diluncurkan di berbagai belahan dunia, baik oleh pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat sipil. Contohnya, beberapa negara telah menerapkan kurikulum literasi digital di sekolah-sekolah, menyediakan pelatihan bagi guru, serta mengembangkan pusat-pusat komunitas yang menyediakan akses dan pelatihan teknologi bagi masyarakat luas. Perusahaan teknologi juga telah meluncurkan berbagai program CSR yang fokus pada literasi digital, seperti pelatihan coding untuk anak-anak dan program mentorship bagi startup lokal. Di sisi lain, organisasi non-pemerintah dan komunitas lokal telah aktif dalam mengadakan lokakarya, seminar, dan kampanye yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan digital di kalangan masyarakat.²

Dengan demikian, peningkatan literasi digital melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat bukan hanya sebuah kebutuhan, tetapi juga sebuah strategi yang efektif untuk mencapai pendidikan yang berkualitas dan inklusif sesuai dengan SDGs 2030. Upaya kolaboratif ini tidak hanya akan meningkatkan kompetensi digital individu, tetapi juga akan memperkuat fondasi bagi pembangunan masyarakat yang lebih cerdas, inovatif, dan berdaya saing di kancah global.

METODE

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk mengeksplorasi bagaimana kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dapat meningkatkan literasi digital dan berkontribusi terhadap pencapaian SDGs 2030 dalam bidang pendidikan. Studi kasus akan difokuskan pada beberapa program literasi digital yang telah berhasil diimplementasikan di berbagai negara, baik di tingkat nasional maupun lokal. Data akan

¹ Palmira Permata Bachtar dkk., "Ekonomi digital untuk siapa," *Menuju Ekonomi Digital yang Inklusif di Indonesia*. The SMERU Research Institute, Jakarta, 2020.

² Rahmat Prayoga dan Julius Christian Sitohang Julius Christian Sitohang, "Kajian Literatur mengenai Arah Pengembangan Ekonomi Kreatif di Indonesia Menuju Tahun 2030," *CAKRAWALA* 30, no. 2 (2023): 59–71.

dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen terkait program-program literasi digital tersebut.

Wawancara mendalam akan dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam inisiatif literasi digital, termasuk perwakilan dari pemerintah, perusahaan teknologi, lembaga pendidikan, dan organisasi non-pemerintah. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai peran masing-masing aktor, strategi kolaborasi yang digunakan, tantangan yang dihadapi, serta dampak yang dirasakan oleh penerima manfaat program. Selain itu, wawancara ini akan mengeksplorasi pandangan dan pengalaman para pemangku kepentingan dalam menerapkan program literasi digital dan kontribusinya terhadap tujuan SDGs 2030.

Observasi partisipatif akan dilakukan dengan terlibat langsung dalam beberapa kegiatan atau program literasi digital yang sedang berlangsung. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengamati secara langsung interaksi antara pemangku kepentingan dan peserta program, serta dinamika kolaborasi yang terjadi di lapangan. Analisis dokumen akan melibatkan pemeriksaan laporan, publikasi, dan materi edukatif yang diproduksi dalam kerangka program literasi digital. Data dari berbagai sumber ini akan dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola kolaborasi yang efektif, faktor-faktor penentu keberhasilan program, serta kontribusi konkret terhadap pencapaian SDGs 2030 dalam pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Pemerintah dalam Peningkatan Literasi Digital

Pemerintah memainkan peran krusial dalam peningkatan literasi digital, terutama karena memiliki otoritas untuk merumuskan kebijakan yang mendukung dan menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan. Salah satu langkah pertama yang dapat diambil pemerintah adalah menetapkan kebijakan nasional yang jelas dan terukur mengenai literasi digital. Kebijakan ini harus mencakup definisi literasi digital, tujuan yang ingin dicapai, serta strategi-strategi untuk mencapainya. Dengan adanya kebijakan yang kuat, pemerintah dapat memastikan bahwa literasi digital menjadi bagian integral dari agenda pendidikan nasional dan pembangunan.³

Selain merumuskan kebijakan, pemerintah juga harus berinvestasi dalam infrastruktur teknologi dan pendidikan yang mendukung pengembangan literasi digital. Ini termasuk penyediaan akses internet yang luas dan terjangkau, terutama di daerah-daerah terpencil dan kurang berkembang. Pemerintah perlu bekerja sama dengan penyedia layanan internet untuk memperluas jaringan broadband dan memastikan bahwa sekolah-sekolah, perpustakaan, dan pusat-pusat komunitas memiliki konektivitas yang memadai. Selain itu, pemerintah harus memastikan bahwa fasilitas teknologi, seperti komputer dan perangkat lainnya, tersedia dan dapat diakses oleh siswa dan masyarakat luas. Dengan infrastruktur yang memadai, masyarakat dapat lebih mudah mengakses sumber daya digital dan program pendidikan yang mendukung peningkatan literasi digital.

Peran pemerintah juga sangat penting dalam mengembangkan kurikulum pendidikan yang mengintegrasikan literasi digital secara menyeluruh. Kurikulum ini harus mencakup berbagai aspek literasi digital, mulai dari keterampilan dasar menggunakan perangkat teknologi hingga kemampuan kritis untuk mengevaluasi informasi yang diperoleh melalui internet. Pendidikan literasi digital harus dimulai sejak dini di sekolah dasar dan berlanjut hingga pendidikan menengah dan tinggi. Pemerintah dapat menyediakan pelatihan bagi guru untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam mengajarkan literasi digital. Selain itu, pengembangan modul pembelajaran yang menarik

³ Faturachman Alputra Sudirman dan Fera Try Susilawaty, "Kesetaraan Gender Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sdgs): Suatu Reviu Literatur Sistematis," *Journal Publicuho* 5, no. 4 (2022): 995–1010.

dan interaktif dapat membantu siswa lebih mudah memahami dan menguasai keterampilan digital.

Pengawasan dan evaluasi program literasi digital juga merupakan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah harus membentuk badan atau lembaga khusus yang bertugas memonitor pelaksanaan program literasi digital di berbagai tingkat pendidikan dan masyarakat. Lembaga ini bertugas untuk mengumpulkan data, mengevaluasi efektivitas program, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Dengan adanya pengawasan yang ketat, pemerintah dapat memastikan bahwa program-program literasi digital berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut, pemerintah juga dapat memfasilitasi kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil. Kolaborasi ini penting untuk memaksimalkan sumber daya dan keahlian yang tersedia dalam mendukung peningkatan literasi digital. Pemerintah dapat memainkan peran sebagai mediator dan koordinator, memastikan bahwa semua pihak bekerja sama secara sinergis dan harmonis. Program-program literasi digital yang berhasil sering kali melibatkan berbagai aktor yang berkontribusi dalam bentuk sumber daya, pengetahuan, dan pengalaman yang berbeda-beda.

Dalam konteks global, pemerintah juga harus aktif berpartisipasi dalam inisiatif internasional yang mendukung literasi digital dan pembangunan berkelanjutan. Melalui kerjasama dengan organisasi internasional dan negara lain, pemerintah dapat berbagi pengalaman, mendapatkan wawasan baru, dan mengadopsi praktik terbaik yang telah terbukti efektif di negara lain. Ini tidak hanya memperkaya program literasi digital di tingkat nasional, tetapi juga berkontribusi pada upaya global untuk mencapai tujuan SDGs 2030 dalam bidang pendidikan dan pengurangan kesenjangan digital.⁴

Secara keseluruhan, peran pemerintah dalam peningkatan literasi digital sangatlah vital. Dengan kebijakan yang tepat, investasi dalam infrastruktur, pengembangan kurikulum yang komprehensif, pengawasan yang ketat, serta fasilitasi kolaborasi multi-stakeholder, pemerintah dapat memastikan bahwa literasi digital menjadi bagian integral dari pendidikan dan pembangunan masyarakat. Hal ini akan membantu membekali individu dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk berhasil di era digital, serta berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

B. Kontribusi Sektor Swasta

Sektor swasta memiliki peran yang sangat penting dalam upaya peningkatan literasi digital. Dengan sumber daya yang besar dan kemampuan inovatif yang dimilikinya, sektor swasta dapat memberikan kontribusi yang signifikan melalui berbagai cara. Salah satu kontribusi utama adalah melalui investasi dalam teknologi dan infrastruktur digital. Perusahaan-perusahaan teknologi, misalnya, dapat membantu menyediakan perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk mendukung program-program literasi digital di sekolah-sekolah dan komunitas. Selain itu, perusahaan telekomunikasi dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk memperluas jaringan internet ke daerah-daerah yang masih kurang terlayani, sehingga lebih banyak orang dapat mengakses informasi dan sumber daya digital.⁵

Sektor swasta juga dapat berperan dalam pengembangan dan penyediaan konten edukatif yang relevan dan menarik. Perusahaan media dan teknologi dapat menciptakan

⁴ Meila Riskia Fitri dan Putri Rima Jauhari, "Kolaborasi Masyarakat Sipil dan Perusahaan dalam Pelaksanaan SDGs di Indonesia," *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual* 2, no. 2 (2020): 90–99.

⁵ Dewi Anggraini dan Siwi Nugraheni, "MENUJU PENDIDIKAN BERKELANJUTAN: IMPLEMENTASI TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGS) DALAM MEWUJUDKAN PENDIDIKAN BERKUALITAS DI INDONESIA," *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI)* 1, no. 3 (2024): 90–97.

platform dan aplikasi pembelajaran yang interaktif dan mudah digunakan, yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan literasi digital di kalangan anak-anak dan orang dewasa. Misalnya, program pelatihan coding dan pengembangan keterampilan digital dasar dapat diimplementasikan melalui kemitraan dengan sekolah dan lembaga pendidikan lainnya. Konten edukatif yang kaya dan bervariasi ini tidak hanya meningkatkan minat belajar tetapi juga memastikan bahwa pengguna memperoleh keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini.

Selain penyediaan teknologi dan konten, sektor swasta juga dapat memberikan kontribusi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) yang fokus pada literasi digital. Banyak perusahaan besar yang telah meluncurkan inisiatif CSR yang dirancang untuk memberdayakan masyarakat melalui pelatihan keterampilan digital. Program-program ini sering kali melibatkan pelatihan langsung, mentoring, dan penyediaan sumber daya pembelajaran bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan atau kurang terlayani. Misalnya, perusahaan teknologi besar seperti Google dan Microsoft memiliki program pelatihan yang ditujukan untuk anak muda, perempuan, dan komunitas-komunitas pedesaan untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam menggunakan teknologi digital secara efektif.

Kemitraan antara sektor swasta dan lembaga pendidikan juga sangat penting dalam upaya peningkatan literasi digital. Perusahaan dapat bekerja sama dengan sekolah dan universitas untuk mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri. Ini termasuk program magang, pelatihan kejuruan, dan kursus keterampilan khusus yang dirancang untuk mempersiapkan siswa menghadapi dunia kerja yang semakin digital. Kolaborasi ini memastikan bahwa lulusan tidak hanya memiliki pengetahuan teoritis, tetapi juga keterampilan praktis yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Dengan demikian, sektor swasta membantu menjembatani kesenjangan antara pendidikan formal dan kebutuhan industri, yang pada gilirannya meningkatkan employability lulusan.

Inovasi adalah area lain di mana sektor swasta dapat memberikan kontribusi yang besar. Perusahaan teknologi terus menerus mencari cara baru untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran digital melalui penggunaan kecerdasan buatan (AI), pembelajaran mesin, dan big data. Teknologi-teknologi ini dapat digunakan untuk mempersonalisasi pengalaman belajar, menilai kemajuan siswa secara real-time, dan memberikan umpan balik yang dapat ditindaklanjuti. Misalnya, platform pembelajaran adaptif yang menggunakan AI dapat menyesuaikan konten dan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan individu, membantu setiap siswa belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Inovasi semacam ini tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan tetapi juga membuatnya lebih inklusif dan dapat diakses oleh lebih banyak orang.

Terakhir, sektor swasta juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya literasi digital. Melalui kampanye pemasaran dan inisiatif edukatif, perusahaan dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keterampilan digital di era modern ini. Kampanye yang efektif dapat menginspirasi individu untuk mengambil langkah proaktif dalam meningkatkan keterampilan digital mereka, baik melalui pendidikan formal maupun pembelajaran mandiri. Sektor swasta, dengan kemampuan dan jangkauan komunikasinya yang luas, dapat menjangkau audiens yang lebih besar dan lebih beragam, membantu menyebarkan pesan tentang pentingnya literasi digital di seluruh lapisan masyarakat.⁶

Secara keseluruhan, kontribusi sektor swasta dalam peningkatan literasi digital sangatlah signifikan. Dengan memanfaatkan sumber daya, inovasi, dan kemampuan mereka untuk bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, sektor swasta

⁶ Endang Semiarti, "Optimalisasi Pemanfaatan Teknik Kultur Jaringan Tumbuhan Dalam Mendukung SDGs 2030 Melalui Sains dan Entrepreneurship," dalam *Seminar Nasional Sains dan Entrepreneurship*, 2022.

dapat membantu menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih kuat dan lebih inklusif. Melalui investasi dalam teknologi, pengembangan konten edukatif, inisiatif CSR, kemitraan dengan lembaga pendidikan, inovasi teknologi, dan kampanye kesadaran, sektor swasta dapat memainkan peran kunci dalam mencapai tujuan literasi digital yang berkelanjutan dan berkontribusi terhadap pencapaian SDGs 2030 dalam bidang pendidikan.

C. Partisipasi Masyarakat dan Organisasi Non-Pemerintah

Partisipasi masyarakat dan organisasi non-pemerintah (NGO) merupakan elemen kunci dalam upaya peningkatan literasi digital. Masyarakat yang terlibat aktif dalam proses pembelajaran digital cenderung lebih mampu mengadopsi dan memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran dan keterlibatan komunitas dapat ditingkatkan melalui inisiatif-inisiatif lokal yang menyoroti kebutuhan spesifik masing-masing kelompok. Misalnya, komunitas dapat mengorganisir pelatihan literasi digital berbasis lingkungan sekitar, yang memungkinkan anggota komunitas untuk belajar dalam konteks yang familiar dan mendukung. Partisipasi ini memastikan bahwa program literasi digital tidak hanya didikte dari atas ke bawah, tetapi juga direspons dan diterapkan oleh mereka yang paling membutuhkan.⁷

Organisasi non-pemerintah (NGO) berperan sebagai jembatan antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. NGO sering kali memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh komunitas-komunitas tertentu. Dengan demikian, mereka dapat merancang dan mengimplementasikan program-program literasi digital yang lebih responsif dan sesuai dengan konteks lokal. Sebagai contoh, NGO dapat bekerja sama dengan sekolah-sekolah dan komunitas untuk menyelenggarakan lokakarya dan pelatihan yang mengajarkan keterampilan dasar komputer, penggunaan internet, serta cara mengakses dan mengevaluasi informasi digital. Program-program ini tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga membangun kepercayaan diri peserta dalam menggunakan teknologi.

Selain itu, NGO sering memainkan peran penting dalam advokasi dan peningkatan kesadaran publik mengenai pentingnya literasi digital. Mereka dapat mengorganisir kampanye publik yang menyoroti berbagai segmen masyarakat, dari anak-anak hingga orang dewasa, untuk mengedukasi mereka tentang manfaat literasi digital dan cara-cara mengembangkan keterampilan tersebut. Kampanye ini bisa dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media sosial, seminar, dan acara komunitas. Dengan memperluas jangkauan informasi, NGO membantu memastikan bahwa literasi digital diakui sebagai kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi untuk kemajuan individu dan masyarakat secara keseluruhan.

NGO juga berperan penting dalam memobilisasi sumber daya untuk mendukung program literasi digital. Mereka dapat menggalang dana dari donor internasional, perusahaan swasta, dan sumber-sumber lain untuk mendanai inisiatif yang mereka jalankan. Dengan sumber daya yang cukup, NGO dapat menyelenggarakan pelatihan, menyediakan perangkat teknologi, dan membangun infrastruktur yang mendukung peningkatan literasi digital. Misalnya, beberapa NGO telah berhasil mendirikan pusat-pusat pembelajaran komunitas yang dilengkapi dengan komputer dan akses internet, di mana anggota komunitas dapat belajar dan berlatih keterampilan digital secara gratis atau dengan biaya yang sangat terjangkau.

Selain peran dalam pendidikan dan advokasi, NGO juga sering terlibat dalam penelitian dan pengembangan kebijakan yang mendukung literasi digital. Mereka dapat melakukan studi lapangan untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik dan tantangan

⁷ Adini Putri Marcelia, "PERAN KONTRIBUSI PHILANTHROPIC INSTITUTION TERHADAP PENCAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) MELALUI PENTAHHELIX MODEL (STUDI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL)" (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022).

yang dihadapi oleh masyarakat dalam mengakses dan menggunakan teknologi. Hasil dari penelitian ini kemudian dapat digunakan untuk menginformasikan pembuat kebijakan dan membantu merumuskan strategi yang lebih efektif dan inklusif. Dengan demikian, NGO tidak hanya membantu dalam implementasi program literasi digital tetapi juga dalam pengembangan kerangka kebijakan yang lebih holistik dan berbasis bukti.⁸

Di banyak kasus, NGO bekerja secara kolaboratif dengan pemerintah dan sektor swasta untuk memaksimalkan dampak dari program literasi digital. Kolaborasi ini bisa berupa kemitraan strategis di mana setiap pihak membawa keunggulan dan sumber daya masing-masing untuk mencapai tujuan bersama. Misalnya, sebuah NGO yang berfokus pada pendidikan dapat bermitra dengan perusahaan teknologi untuk menyediakan pelatihan keterampilan digital, sementara pemerintah mendukung dengan menyediakan infrastruktur dan kebijakan yang kondusif. Kolaborasi semacam ini memastikan bahwa upaya peningkatan literasi digital dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.⁹

Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat dan organisasi non-pemerintah merupakan komponen esensial dalam ekosistem peningkatan literasi digital. Dengan pendekatan yang inklusif dan partisipatif, masyarakat dan NGO dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih responsif dan relevan dengan kebutuhan lokal. Peran mereka dalam pendidikan, advokasi, mobilisasi sumber daya, penelitian, dan kolaborasi memastikan bahwa literasi digital dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, sehingga berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam bidang pendidikan.¹⁰

KESIMPULAN

Peningkatan literasi digital melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat merupakan strategi yang sangat penting dalam menghadapi tantangan era digital dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) 2030, khususnya dalam bidang pendidikan. Literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan teknis dalam menggunakan perangkat digital, tetapi juga keterampilan kritis dalam menavigasi dan mengevaluasi informasi yang diperoleh melalui media digital. Dengan demikian, literasi digital menjadi dasar penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam ekonomi dan kehidupan sosial yang semakin terhubung secara digital.

Pemerintah memiliki peran sentral dalam merumuskan kebijakan, menyediakan infrastruktur, dan memastikan bahwa literasi digital menjadi bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Investasi dalam infrastruktur teknologi dan pengembangan kurikulum yang komprehensif adalah langkah-langkah kunci yang dapat diambil oleh pemerintah untuk mendukung peningkatan literasi digital. Selain itu, pengawasan dan evaluasi yang ketat terhadap program-program literasi digital memastikan bahwa inisiatif-inisiatif ini berjalan efektif dan mencapai sasaran yang diinginkan.

Sektor swasta juga berperan signifikan dalam mendukung literasi digital melalui inovasi teknologi, penyediaan perangkat dan platform edukatif, serta program-program Corporate Social Responsibility (CSR) yang fokus pada pelatihan dan pemberdayaan masyarakat. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan untuk mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri membantu menjembatani kesenjangan antara pendidikan formal dan dunia kerja. Inovasi teknologi seperti kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin dapat meningkatkan kualitas pembelajaran digital dan membuatnya lebih personal dan efektif.

⁸ Chandra Anggyetta Pramesti dan Nursiwi Nugraheni, "Urgensi dan Capaian SDGs Bidang Pendidikan untuk Mewujudkan Pendidikan Berkualitas Di Indonesia," *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI)* 1, no. 3 (2024): 50–55.

⁹ A. Halim Iskandar, *SDGs desa: percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020).

¹⁰ I. Gede Iwan Sudipa dkk., *Teknologi Informasi & SDGs* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

Partisipasi masyarakat dan organisasi non-pemerintah (NGO) melengkapi upaya ini dengan pendekatan yang lebih lokal dan berbasis komunitas. Melalui advokasi, pendidikan, dan mobilisasi sumber daya, NGO dapat menjangkau kelompok-kelompok yang terpinggirkan dan memastikan bahwa manfaat literasi digital dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kolaborasi antara masyarakat, NGO, pemerintah, dan sektor swasta menciptakan ekosistem yang mendukung peningkatan literasi digital secara holistik dan berkelanjutan.

Kesuksesan peningkatan literasi digital memerlukan sinergi dan kolaborasi yang erat antara semua pemangku kepentingan. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat masing-masing memiliki peran unik dan saling melengkapi dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan keterampilan digital. Dengan kebijakan yang tepat, inovasi teknologi, dan partisipasi aktif masyarakat, literasi digital dapat ditingkatkan secara signifikan, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pencapaian tujuan SDGs 2030. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas pendidikan tetapi juga memberdayakan individu untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat digital, mengurangi kesenjangan digital, dan mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Dewi, dan Siwi Nugraheni. "MENUJU PENDIDIKAN BERKELANJUTAN: IMPLEMENTASI TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGS) DALAM MEWUJUDKAN PENDIDIKAN BERKUALITAS DI INDONESIA." *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI)* 1, no. 3 (2024): 90–97.
- Bachtiar, Palmira Permata, Rendy A. Diningrat, Ahmad Zuhdi Dwi Kusuma, R. Al Izzati, dan Abella Diandra. "Ekonomi digital untuk siapa." *Menuju Ekonomi Digital yang Inklusif di Indonesia. The SMERU Research Institute, Jakarta, 2020.*
- Fitri, Meila Riskia, dan Putri Rima Jauhari. "Kolaborasi Masyarakat Sipil dan Perusahaan dalam Pelaksanaan SDGs di Indonesia." *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual* 2, no. 2 (2020): 90–99.
- Iskandar, A. Halim. *SDGs desa: percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020.
- Marcelia, Adini Putri. "PERAN KONTRIBUSI PHILANTHROPIC INSTITUTION TERHADAP PENCAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) MELALUI PENTAHELIX MODEL (STUDI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL)." UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022.
- Pramesti, Chandra Anggyetta, dan Nursiwi Nugraheni. "Urgensi dan Capaian SDGs Bidang Pendidikan untuk Mewujudkan Pendidikan Berkualitas Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI)* 1, no. 3 (2024): 50–55.
- Prayoga, Rahmat, dan Julius Christian Sitohang Julius Christian Sitohang. "Kajian Literatur mengenai Arah Pengembangan Ekonomi Kreatif di Indonesia Menuju Tahun 2030." *CAKRAWALA* 30, no. 2 (2023): 59–71.
- Semiarti, Endang. "Optimalisasi Pemanfaatan Teknik Kultur Jaringan Tumbuhan Dalam Mendukung SDGs 2030 Melalui Sains dan Entrepreneurship." Dalam *Seminar Nasional Sains dan Entrepreneurship*, 2022.
- Sudipa, I. Gede Iwan, Budi Harto, Wildoms Sahusilawane, Hery Afriyadi, Sri Lestari, dan Dewi Handayani. *Teknologi Informasi & SDGs*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Sudirman, Faturachman Alputra, dan Fera Try Susilawaty. "Kesetaraan Gender Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sdgs): Suatu Reviuw Literatur Sistematis." *Journal Publicuho* 5, no. 4 (2022): 995–1010.